

Penerapan Akuntansi Lingkungan Pada Pam Tirta Karajae Kota Parepare (Analisis Akuntansi Syariah)

Isma Wulandari Pryatna¹, Moh. Yasin Soumena², Musmulyadi³, Syahriyah Semaun⁴, Damirah⁵,

Institut Agama Islam Negeri Parepare^{1,2,3,4,5}

Institut Ilmu Sosial Andi Sapada⁶

Abstrak

Environmental accounting basically requires full awareness of companies that benefit from the environment. Environmental accounting is accounting in which it identifies, measures, presents, and discloses costs related to company activities related to the environment. The purpose of this study is to find out how to identify, measure, and disclose environmental accounting and analyze according to sharia accounting at PAM Tirta Karajae, Parepare City through three sharia accounting principles. This research uses a qualitative descriptive research method and is a type of field research. The results of the study show that 1) the application of environmental accounting at PAM Tirta Karajae, Parepare City, is not in accordance with existing standards. 2) how to measure costs, such as the cost of maintaining raw sources using rupiah units in the amount issued by the company and referring to the cost of realization of the previous period's budget and has disclosed environmental management in expenditure costs. 3) the way of identifying, measuring and disclosing in environmental accounting is not in accordance with the three principles of sharia accounting, because the identification of environmental accounting costs has not been shown in the financial statements, while the measurement and disclosure of environmental management costs only attaches maintenance costs to raw sources in expenditure costs.

Keywords : Environmental Accounting, Tirta Karajae, Sharia Accounting Analysis

Copyright (c) 2023 Musmulyadi

 Corresponding author :

Email Address : musmulyadi@iainpare.ac.id

PENDAHULUAN

Indonesia telah memiliki suatu kerangka diperuntukkan sebagai media untuk konservasi lingkungan yakni dengan menerbitkan UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN tahun 2009 N0. 140, disingkat dengan UUPPLH) yang merupakan revisi dari perubahan peraturan sebelumnya yaitu UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun di dalam aturan hukum yang mengatur penerapan *green accounting* pada perusahaan swasta diatur dalam PP No. 47 Tahun 2012 yang merupakan tindak lanjut dari UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007. Dalam undang-undang disebutkan bahwa setiap perseroan mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang menjalankan usahanya di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam.

Akuntansi lingkungan merupakan bidang ilmu akuntansi yang memiliki fungsi untuk mengidentifikasi, mengukur, menilai, serta melaporkan akuntansi lingkungan. Akuntansi lingkungan pada dasarnya menuntut kesadaran penuh perusahaan-perusahaan atau organisasi lainnya yang mengambil manfaat dari lingkungan. Manfaat yang diambil ternyata telah berdampak pada maju dan berkembangnya bisnis atau kegiatan organisasi kesehatan. Oleh karena itu penting

bagi perusahaan-perusahaan atau organisasi lainnya agar dapat meningkatkan usaha mempertimbangkan konservasi lingkungan secara berkelanjutan.

PAM Tirta Karajae Kota Parepare yang sebelumnya bernama PDAM Parepare merupakan salah satu bentuk dari organisasi pelayanan yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat dengan menyediakan kebutuhan air bersih. Namun, kegiatan operasional PAM Tirta Karajae Kota Parepare dalam memproses produksi air bersih tersebut menghasilkan limbah lumpur kasar dan halus. Kandungan dalam lumpur tersebut terdeteksi mengandung aluminium sulfat/tawas pada proses pengolahan air bersih. Adanya kandungan logam aluminium di dalam lumpur tergolong sebagai limbah bahan berbahaya beracun sehingga diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan.

Kota Parepare merupakan salah satu kota di Sulawesi Selatan yang memiliki masalah lingkungan yang cukup kompleks, seperti pencemaran air dan udara, deforestasi, dan kerusakan lingkungan lainnya. Oleh karena itu, penerapan konsep akuntansi lingkungan dalam kegiatan operasional perusahaan dapat membantu untuk mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan dampak kegiatan operasional terhadap lingkungan. Bukan hanya itu, dalam bidang akuntansi pun ikut berperan dalam upaya pelestarian lingkungan, yaitu melalui pengungkapan sukarela dalam laporan keuangannya terkait dengan biaya lingkungan atau *environmental cost*. Melalui aktivitas-aktivitas lingkungan dan pengungkapan aktivitas-aktivitas tersebut pada laporan tahunan menyebabkan pengguna laporan keuangan (investor, manajemen, kreditor) akan mendapatkan informasi untuk pengambilan keputusan atau kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan di masa yang akan datang. Selain itu, penerapan akuntansi lingkungan pada PAM Tirta Karajae Kota Parepare dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kinerja perusahaan, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

PAM Tirta Karajae Kota Parepare, dalam aspek ekonomi dapat diukur dari sisi kualitas pelayanan kepada konsumen dan masyarakat sekitar, serta upaya perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan aspek lingkungan dapat diukur dari sisi dampak kegiatan operasional pada lingkungan, serta upaya perusahaan dalam mengurangi dampak tersebut. Tantangan dalam implementasi akuntansi lingkungan dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan, penerapan akuntansi lingkungan oleh PAM Tirta Karajae Kota Parepare dianggap sebagai salah satu strategi yang dapat membantu perusahaan untuk memonitor dan mengelola dampak lingkungan dari kegiatan operasionalnya.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di PAM Tirta Karajae Kota Parepare untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi lingkungan sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan di sekitar perusahaan, terutama di sumber-sumber air di mana perusahaan ini mengeksplorasinya dengan menggunakan analisis akuntansi syariah yaitu prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan dan prinsip kebenaran.

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Sepanjang penelusuran referensi yang penulis lakukan, penulis menemukan penelitian yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Terdapat penelitian yang relevan dengan variabel yang peneliti teliti sekarang yaitu peneliti Vida Vivianti, 2010

yang berjudul “*Analisis Penerapan dan Pelaporan Akuntansi Lingkungan Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap Lingkungan Pada PDAM Kabupaten Malang*”. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi lingkungan di PDAM Kabupaten Malang sudah dilaksanakan dengan cukup baik, terbukti bahwa penerapan akuntansi lingkungan yang dilaksanakan perusahaan sudah sesuai dengan konsep akuntansi lingkungan yang menggariskan bahwa biaya produksi untuk pengelolaan lingkungan hidup dimasukkan ke perhitungan biaya produksi dan harga jual produk. Selain itu, juga ditunjang dengan adanya sertifikat ISO 9001: 2001 yang dimiliki perusahaan sehingga perusahaan dianggap telah mampu melaksanakan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dengan sebaik-baiknya.

Persamaan penelitian yang dilakukan Vida Vivianti dengan yang akan penulis lakukan adalah meneliti terkait penerapan akuntansi lingkungan pada perusahaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian Vida Vivianti memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pada rumusan masalah yang akan di teliti. Penelitian yang dilakukan Vida Vivianti bagaimana bentuk pelaporan akuntansi lingkungan pada laporan keuangan tahunan yang dibuat oleh perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan PDAM Kabupaten Malang sedangkan penelitian yang dilakukan penulis bagaimana cara pengidentifikasian, pengukuran dan pengungkapan akuntansi lingkungan dan bagaimana analisis akuntansi syariah terhadap penerapan akuntansi lingkungan pada PAM Tirta Karajae Kota Parepare.

Teori Legitimasi (*Lagitimacy Theory*) berfokus pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat. Teori legitimasi ini cocok untuk digunakan dalam akuntansi lingkungan yaitu green accounting itu sendiri, karena legitimasi bagi perusahaan yang peduli lingkungan itu sangat penting sehingga perusahaan dapat diterima oleh masyarakat dilingkungan perusahaan itu berada, agar aktivitas perusahaan dapat berlanjut kemudian hari.

Menurut Dowling dan Pfeffer, teori legitimasi sangat bermanfaat dalam menganalisis perilaku organisasi. Kedua peneliti tersebut menyatakan bahwa legitimasi adalah hal yang penting bagi organisasi, batasan-batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial, dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan.

Teori legitimasi berfokus pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat. Menurut Dowling dan Pfeffer, hal tersebut didasarkan pada pandangan bahwa perusahaan berusaha untuk menciptakan keselarasan antara nilai-nilai sosial yang melekat dalam kegiatannya dengan norma-norma perilaku yang ada dalam sistem sosial masyarakat dimana perusahaan adalah bagian dari sistem tersebut. selama kedua sistem nilai tersebut selaras, hal tersebut dapat dipandang sebagai legitimasi perusahaan. Namun, ketika terjadi ketidakselarasan aktual diantara kedua sistem nilai tersebut, maka akan terdapat ancaman terhadap legitimasi perusahaan.

Teori legitimasi merupakan upaya perusahaan untuk memastikan bahwa perusahaan dalam kegiatan operasinya dalam batasan nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat atau lingkungan tempat perusahaan berada. Teori legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu, kegiatan operasi perusahaan harus sesuai dengan harapan masyarakat. Menurut Purwanto dengan teori legitimasi perusahaan secara terus menerus mencoba untuk meyakinkan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan perusahaan sesuai dengan batasan dan norma masyarakat dimana perusahaan

berada. Teori ini juga menganjurkan kepada perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat. Perusahaan menggunakan laporan tahunan mereka untuk menggambarkan kesan tanggung jawab lingkungan, sehingga mereka diterima oleh masyarakat. Organisasi perusahaan harus mengkomunikasikan aktivitas lingkungan dengan melakukan pengungkapan lingkungan sosial.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara yang lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memecah masalahnya dengan menggunakan data empiris. Jenis penelitian ini termasuk *field research* atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Kaitannya dengan penelitian ini, langkah yang dilakukan atau mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk menganalisis data. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu dengan apa adanya. Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang mengungkapkan masalah yang nampak dari mencari fakta tentang penerapan akuntansi lingkungan pada PAM Tirta Karajae Kota Parepare dengan menggunakan analisis akuntansi syariah.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang dalam bentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Sumber data yang diperlukan oleh penulis dengan penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu: 1) Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan objek penelitian dalam hal ini *Assisten Manager* Pembukuan dan Akuntansi PAM Tirta Karajae Kota Parepare dan staf terkait. 2) Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Adapun teknik yang digunakan dalam penyusunan ini antara lain observasi, wawancara dan dokumentasi.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Akuntansi lingkungan sebagai metode untuk mengungkapkan dan menyajikan perlakuan biaya yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan memerlukan tahap-tahap yang berurutan dan rinci dengan tetap mengacu pada standar akuntansi maupun pernyataan akuntansi yang berlaku umum.

Mengidentifikasi peristiwa-peristiwa ekonomi akan melibatkan pemilihan aktivitas-aktivitas ekonomi yang relevan bagi suatu organisasi tertentu. Pengidentifikasian merupakan tahap awal dari tahapan siklus akuntansi, dengan melakukan identifikasi terhadap transaksi-transaksi bisnis yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam periode tertentu. Identifikasi yang dilakukan oleh PAM Tirta Karajae Kota Parepare dalam melakukan tahapan-tahapan perlakuan biaya lingkungan khususnya pengolahan limbah diperlakukan sebagai biaya umum.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Wiwiek Hastya bagian pembukuan dan akuntansi mengatakan bahwa:

“Untuk biaya terkait lingkungan itu tidak secara detail karena akuntansi lingkungan ini belum diterapkan di PAM Tirta Karajae melainkan hanya menggunakan SAK-ETAP, paling kalau terkait biaya itu hanya ada biaya pegawai, biaya produksi, biaya pemeliharaan saluran air baku dan biaya sumber air.”

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dapat diketahui bahwa biaya yang dikeluarkan oleh pihak PAM Tirta Karajae Kota Parepare yaitu biaya pegawai, biaya pemeliharaan, biaya produksi dan biaya lainnya. Pengidentifikasian ini disesuaikan dengan kebijakan perusahaan. Tidak adanya standar yang mengatur secara khusus mengenai perlakuan biaya yang telah dikeluarkan untuk pengelolaan efek negatif dari sisa hasil operasional perusahaan. Sedangkan biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam hal pengelolaan limbah belum sesuai dengan teori Susenohaji yang mana dalam mengidentifikasi biaya-biaya yang dikeluarkan PAM Tirta Karajae Kota Parepare hanya biaya pemeliharaan saluran air bukan terkait pengelolaan limbahnya. Sedangkan teori Susenohaji mengeluarkan Biaya pemeliharaan dan penggantian dampak akibat limbah dan gas buangan, Biaya pencegahan dan pengelolaan lingkungan, Biaya pembelian bahan untuk bukan hasil produksi, dan Biaya pengelolaan untuk produk.

PAM Tirta Karajae belum menerapkan akuntansi lingkungan dan hanya menggunakan akuntansi secara umum digunakan karena akuntansi lingkungan tergolong masih baru sehingga penerapannya masih di dalam tahap perencanaan dan pengkajian apakah efektif untuk diterapkan di PAM Tirta Karajae dalam jangka Panjang ketimbang akuntansi secara umum.

PAM Tirta Karajae Kota Parepare dalam mengukur biaya-biaya lingkungan atas aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan lingkungan yaitu menggunakan Rupiah walaupun belum adanya standar pengukuran mengenai biaya lingkungan. Maka pengukuran yang dilakukan untuk menentukan kebutuhan pengalokasian pembiayaan sesuai dengan kondisi perusahaan yang bersangkutan sebab masing-masing perusahaan memiliki standar pengukuran yang berbeda. Hal ini diungkapkan pada hasil wawancara Ibu Wiwiek bagian pembukuan dan akuntansi mengatakan bahwa:

“PAM Tirta Karajae ini menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dan pengukurannya mengacu pada realisasi anggaran periode sebelumnya dan anggaran disini bukan dibiayai oleh PEMDA melainkan anggarannya berasal dari perusahaan itu sendiri.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa PAM Tirta Karajae Kota Parepare mengukur biaya pengolahan menggunakan satuan moneter yaitu berdasarkan realisasi anggaran periode sebelumnya dan telah sesuai dengan teori Suwardjono, yaitu mengukur menggunakan satuan rupiah dan mengacu pada realisasi anggaran periode sebelumnya. Sampai saat ini pengukuran terkait dengan biaya lingkungan belum diterapkan standar pengukurannya. Sehingga pengukuran biaya lingkungan lebih berdasarkan pada kebijakan yang ada disuatu perusahaan.

Bentuk pengungkapan merupakan transparansi suatu entitas kepada publik. Selain itu, pengungkapan memberikan informasi yang bermanfaat yang tidak dapat dijelaskan oleh data keuangan. Terkait dengan biaya lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan, memang belum ada standar khusus yang mengatur tentang pengungkapannya. Namun, akan lebih baik jika perusahaan mengungkapkannya.

Pengungkapan dalam akuntansi lingkungan merupakan jenis pengungkapan suka rela, berkaitan dengan masalah bahwa suatu informasi keuangan sebuah keuangan atau kebijakan akuntansi perusahaan tersebut diungkapkan atau tidak. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, PAM Tirta Karajae Kota Parepare mengungkapkan pengelolaan lingkungan hidup yang dicatat sebagai biaya pengeluaran.

1. Prinsip Pertanggungjawaban

Penyusunan laporan keuangan pusat pertanggungjawaban harus selalu bertanggungjawab dan berjanji bahwa mereka tidak akan mengkhianati atas wewenang yang telah diberikan oleh pimpinan di atasnya. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Wiwiek selaku bagian pembukuan dan akuntansi PAM Tirta Karajae Kota Parepare.

“Dalam mempertanggungjawabkan laporan keuangan tentunya dimulai dari neraca, cash flow, laba rugi, perubahan modal dan catatan atas laporan keuangan berdasarkan SAK-ETAP kemudian dilaporkan kepada direktur utama dan manager keuangan. Namun dalam hal biaya-biaya pengelolaan limbah tersebut tidak disebut secara detail karena memang anggaran yang digunakan hanya untuk biaya terkait operasional saja seperti biaya produksi, biaya pemeliharaan, biaya pegawai dan biaya sumber baku.”

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa PAM Tirta Karajae menyusun laporan keuangan dengan menggunakan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam pembukuan dan penyusunan laporan keuangan oleh PAM Tirta Karajae Kota Parepare telah menetapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) untuk penyusunan laporan keuangan. Sedangkan terkait pengidentifikasian, pengukuran dan pengungkapan akuntansi lingkungan belum sepenuhnya di terapkan karena PAM Tirta Karajae Kota Parepare masih dalam tahap perencanaan untuk menerapkan akuntansi lingkungan mengingat bahwa anggaran yang mereka gunakan saat ini hanya untuk biaya operasional perusahaan saja dan belum adanya kebijakan yang mengatur untuk menjalankan perusahaan yang berbasis konservasi lingkungan. Hal ini belum sepenuhnya sejalan dengan teori Muammar Khaddafi yang mengatakan bahwa prinsip pertanggungjawaban dalam akuntansi syariah selalu berkaitan dengan konsep amanah dimana individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan perbuat kepada pihak-pihak yang terkait. Berikut adalah data terkait biaya yang di lampirkan dalam laporan laba rugi:

Tabel 1.1 Beban atau Biaya PAM Tirta Karajae**2. Prinsip Keadilan**

Penyusunan laporan keuangan harus menyampaikan amanah secara adil kepada yang berhak menerimanya dan memberikan amanah kepada pimpinan yang berwenang sesuai dengan apa yang telah di kerjakan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Wiwiek Hastya selaku bagian pembukuan dan akuntansi PAM Tirta Karajae Kota Parepare.

“Untuk transaksi yang dilakukan itu ialah seperti penerimaan pendapatan atau pengeluaran langsung dimasukkan kedalam pencatatan sesuai dengan bukti transaksi yang ada lalu dilakukan penjurnalan.”

Berdasarkan wawancara dan pernyataan dapat dikatakan bahwa PAM Tirta Karajae melalui prinsip keadilan ini melaksanakan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan penyediaan air bersih terhadap anggaran guna menerapkan nilai-nilai keadilan dengan pencatatan atau transaksi yang dilakukan tidak melebihi atau mengurangi data keuangan dalam bukti transaksi yang ada. Sedangkan dalam hal mengidentifikasi, pengukuran dan pengungkapan akuntansi lingkungan masih belum terlihat dalam laporan keuangan perusahaan melainkan hanya menggunakan prinsip akuntansi yang berlaku umum saja.

Beban Usaha		2022		2021
Beban Pegawai		11.062.203.094		11.421.088.243
Beban BBM		668.371.234		434.959.622
Beban Listrik		5.174.597.921		5.048.170.945
Beban Kantor		631.463.923		604.036.200
Beban Bahan Kimia		2.169.593.663		1.701.606.750
Beban Penelitian dan Pengembangan		99.122.000		272.184.000
Beban Pemeliharaan		1.290.267.480		762.047.228
Beban Penyusutan dan Amortisasi		9.449.698.036		8.980.156.349
Beban Penyisihan Piutang & Non Air		1.328.122.900		330.039.573
Beban Umum		2.247.428.146		2.227.199.005
Beban Operasi Lainnya		2.868.399.509		2.801.238.689
Beban Lain-lain		350.064.221		37.782.110

3. Prinsip Kebenaran

Penyusunan dalam laporan keuangan itu harus benar karena itu kita selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran laporan dan menghindari sikap keraguan terhadap kebenaran Tuhan. Sebagaimana wawancara dengan Ibu Wiwiek Hastya selaku bagian pembukuan dan akuntansi PAM Tirta Karajae Kota Parepare.

“Laporan keuangan dibuat dengan laporan yang sesuai standar keuangan yang berlaku dan biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan perusahaan memang benar sesuai dengan bukti transaksi tetapi untuk biaya akan pengolahan limbah itu belum di berlakukan di sini karena anggaran yang digunakan hanya digunakan untuk pemeliharaan di perusahaan saja bukan untuk di terkait dengan lingkungan.”

Berdasarkan wawancara dan pernyataan di atas maka PAM Tirta Karajae melaporkan semua anggaran biaya yang dikeluarkan dan mengakui bahwa laporan keuangan yang dibuat itu benar dan sesuai dengan bukti yang ada. Meskipun dalam

laporan keuangan belum menyertakan biaya akan pengelolaan limbah melainkan hanya menyertakan biaya akan pemeliharaan sumber baku atau biaya produksi saja.

Tiga prinsip yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa analisis akuntansi syariah terhadap cara mengidentifikasi, pengukuran dan cara pengungkapan dalam akuntansi lingkungan ini belum sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran. Meskipun dalam mempertanggungjawabkan laporan sangat transparansi karena laporan keuangan tersebut telah di laporkan kepada direktur utama dan transaksi pengeluaran dan penerimaan pendapatan disimpan pada buku laporan dengan tidak melebihkan dan mengurangi data keuangan. Namun, terkait cara mengidentifikasi akuntansi lingkungan belum di terlihat dalam laporan keuangan sedangkan terkait pengukuran dan pengungkapan biaya pengelolaan lingkungan hanya melampirkan biaya pemeliharaan sumber baku dalam biaya pengeluaran. Hal ini dikarenakan sejauh ini belum ada kebijakan dari perusahaan untuk mengatur tentang konservasi lingkungan perusahaan dan terkait limbah yang dihasilkan masih tergolong aman untuk lingkungan sekitar sehingga penerapan akuntansi lingkungan di PAM Tirta Karajae masih dalam tahap perencanaan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Viter selaku bagian produksi dan pengolahan PAM Tirta Karajae Kota Parepare bahwa:

“Kalau keluhan masyarakat disini terhadap limbah yang dihasilkan sejauh ini tidak ada masalah dan aman-aman saja.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat dikatakan bahwa PAM Tirta Karajae sangat baik dalam akuntansi lingkungan karena telah berupaya untuk memastikan bahwa tidak ada limbah yang menjadi ancaman di sekitar lingkungan kegiatan operasional perusahaan dan meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerja perusahaan dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori legitimasi yang dinyatakan oleh Ghozali dan Chariri bahwa upaya perusahaan untuk memastikan bahwa perusahaan dalam kegiatan operasinya dalam batasan nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat atau lingkungan tempat perusahaan berada. Maksudnya, Teori ini menganjurkan kepada perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat. Sehingga, perusahaan menggunakan laporan tahunan mereka untuk menggambarkan kesan tanggung jawab lingkungan, sehingga mereka diterima oleh masyarakat.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan mengenai penerapan akuntansi lingkungan pada PAM Tirta Karajae Kota Parepare dengan menggunakan analisis akuntansi syariah maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan akuntansi lingkungan pada PAM Tirta Karajae Kota Parepare belum sesuai dengan standar yang ada diantaranya adalah cara mengidentifikasi biaya lingkungan dimana PAM Tirta Karajae Kota Parepare belum melakukan klasifikasi biaya terkait pengelolaan lingkungan yang terjadi seperti yang diidentifikasi oleh Susenohaji.
2. PAM Tirta Karajae mengakui biaya-biaya seperti biaya pemeliharaan sumber baku dan mengukur biaya tersebut menggunakan satuan rupiah sebesar yang dikeluarkan perusahaan dan biaya yang dikeluarkan mengacu pada biaya realisasi anggaran periode sebelumnya sesuai teori Susenohaji dan telah mengungkapkan pengelolaan lingkungan hidup dalam biaya pengeluaran.

3. Analisis akuntansi syariah terhadap cara mengidentifikasi, pengukuran dan cara pengungkapan dalam akuntansi lingkungan ini belum sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran karena identifikasi biaya akuntansi lingkungan belum terlihat dalam laporan keuangan. Sedangkan terkait pengukuran dan pengungkapan biaya pengelolaan lingkungan hidup hanya melampirkan biaya pemeliharaan sumber baku dalam biaya pengeluaran. Namun, PAM Tirta Karajae sudah cukup baik dalam akuntansi lingkungan karena telah berupaya untuk memastikan bahwa tidak ada limbah yang menjadi ancaman di sekitar lingkungan kegiatan operasional perusahaan dan meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerja perusahaan dapat diterima oleh masyarakat.

Berdasarkan simpulan penelitian, maka dapat disampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak PAM Tirta Karajae Kota Parepare apabila ingin menerapkan akuntansi lingkungan dengan lebih baik lagi, perusahaan dapat membuat laporan terkait biaya lingkungan yang bisa mengungkap seluruh biaya tentang pengolahan lingkungan yang lebih rinci.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menganalisis data yang terkait dalam aktivitas lingkungan yang menimbulkan biaya dapat dikaji lebih luas lagi.

Referensi :

- Djogo, Tony. (2006). *Akuntansi Lingkungan*. Jakarta.
- Ghozali, Imam dan A. Chariri. *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2007.
- Ghozali, Imam dan A. Chariri. (2014). *Teori Akuntansi International Financial Reporting Standards*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ikhsan, Arfan. (2009). *Akuntansi Manajemen Lingkungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ikhsan, Arfan. (2009). *Akuntansi Keperilakuan Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- J., Dowling dan Pfeffer, J. (1975). *Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational Behavior*. The Pasific Sociological Review.
- Khaddafi, Muhammar, et al., eds. *Akuntansi Syariah*. Medan: Madenatera. 2016.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 114/PMK.05/2012
- Suwardjono. (2013). *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan edisi III*. Yogyakarta: BPFE.
- Vivianti, Vida. (2010). *"Analisis Penerapan dan Pelaporan Akuntansi Lingkungan Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap Lingkungan Pada PDAM Kabupaten Malang"*. Skripsi Sarjana; Universitas Brawijaya